



Tri Dharma Tolak Penataan 'Ungkur-ungkur'

YOGYA, TRIBUN - Wacana pemerintah untuk menata pedagang kaki lima (PKL), yang rencananya dimulai di sisi barat area pedestrian Malioboro, tampaknya belum bisa berjalan mulus. Setelah PKL Pemalni meny-

takan kesiapan dan dukungan untuk ditata, kini giliran Paguyuban PKL Tri Dharma menyatakan penolakannya.

Datang ke Balai Kota Yogyakarta, Ketua Tri Dharma, Mudjiyo, menjelaskan bahwa pihaknya dengan tegas menolak penataan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan tersebut.

"Pedagang yang ditempatkan di belakang, ini



KE BALAI KOTA - Ketua Tri Dharma, Mudjiyo saat datang ke Balai Kota Yogyakarta, Senin (22/7).

● ke halaman 15

Tri Dharma

● Sambungan Hal 9

berpotensi menimbulkan permasalahan. Kami akan kesulitan menata lapak. Kalau ada yang beli, kami melayani gimana karena unkur- unkur (saling membelakangi)," ungkapnya, di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (22/7).

Ia pun menanyakan terkait kepastian lahan yang dikosongkan akan bisa tetap kosong atau justru diisi oleh PKL lain yang memanfaatkan

kan situasi. "Lalu apa iya yang ada di belakang kami adalah PKL asli (Pemalni) atau ada PKL lain yang ikut-ikutan," ujarnya.

Mudjiyo menambahkan, saat ini kondisi lapak mereka memiliki luasan yang jauh berkurang dari ukuran awal yakni 1,5 meter. Dikhawatirkan, penataan tersebut semakin membuat keberadaan 920 anggota PKL Tri Dharma terimpit bahkan kehilangan lapaknya. "Kalau kondisi saat ini, kami terpotong-potong tapi kami masih bisa menerima," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Tri Dharma Paul Zulkarnaen mengutarakan pernyataan yang senada dengan Mudjiyo. Ia mengaku penataan tersebut bukan justru membuat Malioboro rapi, tapi sebaliknya yakni justru terkesan kumuh.

"Kekhawatirannya adalah kalau unkur-ungkur jadi tidak rapi. Selain itu juga memicu konflik kepentingan. Misal mau buka, tapi enggak bisa menata gerobak," ujarnya.

Audiensi

Sementara itu, Direktur Lembaga Konsultasi

Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, Thomas Nurana yang mendampingi Mudjiyo ke Balai Kota Yogyakarta mengatakan, maksud kedatangan mereka adalah untuk memasukkan permintaan audiensi terkait penataan PKL.

"Kita mohon audiensi sampai hari ini (kemarin), belum ada jawaban. Ini memasukkan permohonan kedua untuk bisa cari solusi yang terbaik, baik dari Tri Dharma maupun yang di luar Tri Dharma agar tidak mempersempit lapak yang sudah ada," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005